

PERLU PERBAIKAN MENYELURUH
Sistem Pendidikan Dokter Spesialis

JAKARTA (KR) - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran di Indonesia, terutama sistem pendidikan dokter spesialis.

“Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan spesialis,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (5/9). Hal tersebut ia sampaikan menyusul terjadinya kasus perundungan terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Kurniasih menyatakan, perbaikan terhadap sistem pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan melalui penerapan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Sebelumnya anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto telah mencontohkan beberapa pasal soal pendidikan kedokteran yang diatur dalam UU Kesehatan, antara lain Pasal 209 yang mengatur profesi kedokteran dan tenaga kesehatan serta

Pasal 220 yang mengatur mengenai standar kompetensi pendidikan dokter.

Edy menyoroti soal sertifikasi pendidik dalam pendidikan profesi spesialis. Sering kali, katanya, pendidik pada program spesialis adalah mereka yang mahir di bidang klinis, tetapi tidak dibekali kemampuan sebagai pendidik.

Menurutnya, pendidik pada program spesialis dari klinis yang tidak memiliki keterampilan pendi-

dikan akan mengajar sesuai pengalamannya. “Dulu diajari sama seniornya dengan dibentak-bentak, maka ketika jadi pendidik, cara itu yang dilakukan,” kata Edy Wuryanto.

Pihaknya, mengusulkan agar pendidik klinis harus memiliki sertifikasi. “Pendidik klinis itu harus punya metode bagaimana membimbing dan mentoring mahasiswanya,” ujar Edy.

Komisi IX DPR menekankan Kemenkes harus segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah perundungan di dunia pendidikan kedokteran. **(Ati)-f**

GURU BESAR PEMERINTAHAN UMY
Prof Dyah Mutiarin Pimpin Kapsipi

BANTUL (KR) - Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMY Prof Dr Dyah Mutiarin, terpilih menjadi ketua Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (Kapsipi) periode 2024-2027. Dyah Mutiarin terpilih dalam Kongres IV Kapsipi dan ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia) yang berlangsung di Samarinda 31 Agustus-1 September 2024. Dyah Mutiarain menggantikan Guru Besar UMY Prof Dr Achmad Nurmandi, ketua periode 2022-2024.

“Ini sejarah, dua periode kepemimpinan yang memimpin dari UMY. Alhamdulillah, ini amanah yang lebih ke pengabdian. Jadi bagaimana pengabdian UMY khususnya Ilmu Pemerintahan bisa mengembangkan keilmuannya, juga menjadi daya saing bagi UMY karena ini



KR-Istimewa
Prof Dr Dyah Mutiarin

adalah kepemimpinan publik,” ujar Dyah saat dihubungi, Selasa (3/9).

Jabatan ini, disebutnya, bukan sekadar formalitas. “Terdapat berbagai tantangan yang saat ini tengah dihadapi Kapsipi. Di antaranya meningkatkan mutu program studi dengan menggunakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME),” jelasnya.

Tantangan lainnya, kata perempuan yang akrab

disebut Arin, berkaitan dengan isu *employability* atau keterserapan lulusan di pasar tenaga kerja. Arin memandang isu ini sangat penting untuk diperhatikan, karena setiap tahun program studi meluluskan mahasiswa, tetapi tidak semuanya dapat terserap.

“Kalau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja berarti ada sesuatu yang salah, kami harus memperbaiki dari sisi employability itu,” ujarnya.

Menurutnya,, penting menjaga stabilitas jumlah mahasiswa khususnya di prodi Ilmu Pemerintahan. Sebagaimana beberapa prodi lain, prodi Ilmu Pemerintahan juga mengalami fluktuasi. Sementara untuk bisa mempertahankan akreditasi, animo pendaftar dalam satu prodi tidak boleh turun lebih dari 10% selama tiga tahun terakhir. **(Fsy)-f**

Maba PMI UIN Suka Pilah Sampah



KR-Istimewa
Mahasiswa baru Prodi PMI UIN mendapatkan sosialisasi pemilahan sampah.

YOGYA (KR) - Pengelolaan sampah untuk penyelamatan lingkungan menjadi tema Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan Sosialisasi Pembelajaran (Sospem) bagi mahasiswa baru (maba) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) berlangsung 20-30 Agustus.

“Sampah sisa dan pembungkus snack dan makanan dibuang pada plastik sampah (trashbag) terpisah dengan empat kategori organik, plastik, kardus dan residu,” tutur Kaprodi Pengembangan Masyarakat

Islam (PMI) Siti Aminah SSosI MSI dalam keterangan persnya, Kamis (5/9).

Disebutkan, kegiatan ini diinisiasi Laboratorium Community Development Center (Comdev Center) Prodi PMI dengan Ketua Comdev Center Suharto MA PhD. “Kita membawa paradigma sampah sebagai *resources*,” jelasnya.

Mahasiswa baru terlebih dulu diedukasi Comdev Center agar melakukan pembuangan sampah secara terpisah. Sofia Nurul Husna, koordinator mahasiswa Comdev Center yang juga Duta Bahasa DIY dalam sesi sosialisasi mengarahkan para juniornya memilah dan membuang sampah.

“Gerakan sederhana memilah sampah sesuai kategori (organik, plastik, kardus dan residu) ini diharapkan menjadi inspirasi bagi semua fakultas di lingkungan UIN Suka, bahkan perguruan tinggi lainnya agar mampu berkontribusi mengurai persoalan sampah,” ungkap Aminah. **(Vin)-f**



KR-Istimewa
HUT ke-72 SMP Negeri 5 Depok Sleman diisi dengan berbagai kegiatan.

Dimulai perlombaan (29-30 Agustus) dan puncak HUT (2 September) berupa bakti sosial, pemotongan tumpeng dan pentas seni menampilkan kreativitas siswa. Ketua Panitia HUT Suhadi SPd menuturkan, peringatan HUT tahun ini mengangkat tema ‘Bersama Berbagi, Bersama Berprestasi’. Sejumlah lomba turut meramaikan HUT seperti lomba kebersihan dan kelengkapan kelas, lomba keluwesan berbusana Jawa, vokal solo lagu Jawa, story telling, paduan suara, maca gurit, wiru jarak dan menghias tumpeng.

EKONOMI

SUKSESKAN PON XXI ACEH-SUMUT
BSI Siapkan Uang Tunai Rp 2,8 Triliun

JAKARTA (KR) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 2,8 triliun, sebagai antisipasi lonjakan transaksi masyarakat, khususnya di Aceh, selama kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna memastikan ketersediaan uang tunai merupakan salah satu komitmen BSI dalam turut mensukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal ini tak lepas dari posisi BSI yang melayani hampir segala sendi kehidupan masyarakat di Bumi Serambi Mekah.

“Uang tunai yang kami siapkan sebesar Rp 2,8 triliun. BSI sebagai bank syariah terbesar di

Indonesia tentu ingin ambil bagian dalam usaha mensukseskan gelaran PON XXI. Aceh menjadi salah satu provinsi penyelenggara. Selain itu, juga salah satu komitmen BSI untuk mensukseskan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh,” kata Anton, Kamis (5/9).

Ia mengatakan, besaran Rp 2,8 triliun tersebut merupakan hasil proyeksi atas kebutuhan uang tunai ATM selama 30 hari (1-30 September 2024) di Regional Aceh yang diperkirakan mengalami peningkatan 15,6% dari realisasi Juli 2024.

Kegiatan PON XXI diperkirakan diikuti 18.000 atlet, official dan panitia, dengan estimasi 4.242.000 pengunjung. Dalam rangka mendukung suksesnya PON XXI, BSI

telah meningkatkan kapasitas layanan, salah satunya menambah jumlah ATM sebanyak 206 unit, dari 704 unit eksisting menjadi total 910 unit.

Selain kebutuhan uang tunai ATM, lanjut Anton, BSI juga memastikan ketersediaan uang tunai untuk transaksi di 16 Kantor Cabang, 137 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 7 Kantor Fungsional Funding (KFF) pada saat PON XX berlangsung.

Selain menyiapkan uang tunai, BSI juga mengoptimalkan layanan-layanan perbankan syariah, baik jelang maupun selama PON XXI. Optimalisasi layanan ini diantaranya BSI Mobile, mesin ATM, layanan kantor cabang, BSI Agen dan merchant QRIS. **(Lmg)-f**



KR-Istimewa
JAJARAN manajemen Astra Motor Yogyakarta (AMY) mengantarkan langsung sepeda motor kepada pembeli. Langkah ini dilakukan untuk menandai Hari Pelanggan Nasional. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen pengguna sepeda motor Honda dengan tema ‘Lebih Dekat, Lebih Hangat’.

PEMKOT PEKALONGAN DAMPINGI PENGUSAHA ANGKUTAN

Jangan Sampai Bahayakan Sopir dan Penumpang

PEKALONGAN (KR) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jateng, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha angkutan umum untuk memenuhi aspek laik jalan dan kelengkapan dokumen.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat (6/9) mengatakan, pembinaan ini diperuntukkan bagi perusahaan angkutan umum baik penyedia jasa angkutan orang ataupun barang dengan kendaraan umum di jalan.

“Kami berharap angkutan atau kendaraan yang dioperasikan di jalan harus dicek agar jangan

sampai membahayakan sopir dan penumpang, maupun pengguna jalan lain,” katanya.

Ia menilai, Faktor keselamatan menjadi hal utama. Walikota berharap, semua perusahaan angkutan umum bisa sukses dengan memperhatikan dan menjaga kendaraan dalam kondisi fit.

Kepala Dinas Perhubungan Kota

Pekalongan Muhammad Restu Hidayat menambahkan, selain faktor teknis, perusahaan angkutan umum harus bisa melengkapi dokumen administrasi atau dokumen perjalanan seperti izin operasi, izin penyelenggaraan, kartu pengawas dan kartu uji KIR.

Pihaknya, juga mengarahkan pengusaha jasa angkutan supaya men-

jamin semua pegawai perusahaan ikut Program BPJS, sehingga ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi bisa terlindungi.

“Kami berharap pembinaan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengetahui sejauh mana keadaan kendaraan-kendaraan milik perusahaan. Jika ada keluhan dari perusahaan kami berusaha meng-cover dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait,” ujar Restu Hidayat. **(Ant)-f**

SINEGAL PRODUKSI VAKSIN

Islamic Development Bank Dukung Bio Farma

BALI (KR) - Lembaga keuangan berpengaruh di kawasan Afrika, Islamic Development Bank (IsDB), mendukung penuh kerja sama yang dilakukan Bio Farma, perusahaan vaksin dan farmasi terkemuka Indonesia, dengan Institut Pasteur de Dakar (IPD) Senegal, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan dan kapasitas produksi vaksin di Afrika.

Dukungan terhadap kerja sama strategis tersebut berlangsung di sela-sela acara Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDC), Nusa Dua, Bali, baru-baru ini. Tepatnya pada Sesi bertajuk ‘Harnessing Sustainable Private Sector Participation in SSTrC through the IsDB Reverse Linkage’.

Sesi penting itu dibuka Director and Resident Representative, Regional Hub Indonesia, Islamic

Development Bank (IsDB), Datuk Amer Bukviar, yang menyatakan Islamic Development Bank (IsDB), bertujuan untuk membantu memperkuat kemampuan dan kapasitas produksi vaksin di Afrika, dengan fokus pada peningkatan kesehatan global dan ketahanan vaksin. Sementara bagi Bio Farma sendiri kerja sama dengan IPD Senegal sebagai bagian dari perluasan yang signifikan dari Program Reverse Linkage-nya. Kemitraan Bio Farma dengan IPD Senegal bertujuan untuk mendukung target Uni Afrika mencapai 60 persen ketahanan vaksin pada tahun 2040, dengan nilai pasar vaksin di Afrika diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS.

Penjelasan mengenai peran dan posisi Indonesia pada sesi tersebut disampaikan Direktur Keuangan dan Manaje-

men Risiko Bio Farma IGN Suharta Wijaya dalam paparannya dengan ‘Private Sector Engagement in Assisting Indonesia in Vaccine Production’, yaitu studi kasus di Indonesia tentang pelibatan sektor swasta untuk mendukung kapasitas produksi Vaksin.

Reverse Linkage merupakan kerangka kerja kolaborasi teknis yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi antar negara anggota IsDB serta komunitas Muslim di negara non-anggota. Sejak diperkenalkan pada 2012, mekanisme ini telah diterapkan dalam berbagai proyek pembangunan kapasitas, dan kini telah menjadi alat penting dalam pembangunan berkelanjutan.

IsDB saat ini sedang mengintegrasikan Reverse Linkage ke dalam proyek-proyek utamanya sebagai alat pengembang-

an kontemporer yang mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan (SSC).

Tantangan utama yang dihadapi Uni Afrika adalah terbatasnya Upaya untuk meningkatkan kemampuan manufaktur vaksin di Afrika dan perluasan cakupan imunisasi yang rendah selama pandemi COVID-19, di mana hanya 10 persen dari populasi Afrika yang telah divaksinasi, dibandingkan dengan Indonesia yang mencapai angka 80 persen.

Bio Farma berupaya memposisikan diri sebagai pemain utama di pasar vaksin global melalui pengembangan produk-produk inovatif yang diharapkan memberikan nilai ekonomi signifikan bagi anggaran nasional di Afrika serta memperkuat kepemimpinan Bio Farma dalam industri vaksin dunia. **(Lmg)-f**